

WAWASAN KEBANGSAAN DI BAWAH TEKANAN GLOBALISASI DAN KEBANGKITAN KEMBALI POLITIK ALIRAN

Nasikun*)

Sebagai suatu gerakan ideologis, wawasan kebangsaan (baca: nasionalisme) tidak pernah muncul tanpa "antisiden" atau peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Di Eropah, misalnya, banyak ahli melihat munculnya wawasan kebangsaan memiliki sumber kelahirannya di dalam perkembangan millenia Kristianisme. Sementara ahli yang lain melihatnya sebagai buah dari perkembangan teknologi percetakan, khususnya dalam industri surat kabar. Beberapa ahli yang lain lagi melihatnya sebagai konsekuensi dari perkembangan industrialisasi dan kapitalisme. Di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang dikemudian hari dikenal sebagai kawasan negara-negara Dunia Ketiga, faham atau wawasan kebangsaan pada umumnya dipahami sebagai konsekuensi dari tumbuhnya kesadaran akan penderitaan bersama di bawah kolonialisme dan imperialisme.

Beragam peristiwa historis-sosiologis memang dapat dilihat dan dipahami sebagai konteks dari kelahiran wawasan kebangsaan, yang di dalam banyak kasus memainkan peran sangat penting sebagai antisiden bagi kehadiran nasionalisme dan lahirnya tuntutan faham kemanusiaan atau humanisme. Tidak mengherankan oleh karenanya jikalau banyak ahli memaknai konsep wawasan kebangsaan atau nasionalisme pertama-tama

sebagai faham atau doktrin tentang "kebebasan" dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan di bawah kolonialisme dan imperialisme, dan doktrin tentang "kedaulatan" sebagai wahana dan prasyarat bagi pengungkapan dan aktualisasi faham kemanusiaan. Wawasan tersebut mengajarkan imperatif atau keharusan bagi setiap bangsa untuk membebaskan diri dari segala bentuk ketidakadilan oleh kehadiran kekuatan eksternal

*) Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

yang represif; untuk membangun kemampuan menentukan nasib sendiri; untuk menjadi "tuan di rumah sendiri"; untuk memiliki kontrol atas sumberdaya-sumberdaya yang mereka miliki; untuk hanya tunduk kepada kekuatan diri sendiri; untuk hidup di dalam kesatuan dan persatuan yang kokoh di dalam mengatasi perbedaan-perbedaan internal; untuk tinggal bersama di dalam wilayah historis yang tunggal sebagai tanah tumpah darah mereka; dan, di atas semua itu, untuk memiliki dan menganut kesamaan legal dan kebudayaan publik yang tunggal pula. Semua itu, sekali lagi dilihat dari perspektif faham kebangsaan, merupakan ekspresi dan sekaligus fondasi dari keabsyahan identitas otentik suatu bangsa.

Itulah semua antisiden yang di masa lalu, di bawah tekanan berat penderitaan yang diciptakan oleh penindasan kolonialisme dan imperialisme, telah menjadi sumber dari kebangkitan wawasan kebangsaan yang telah berhasil mengantarkan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi kini, di bawah penetrasi kekuatan globalisasi dan tuntutan demokratisasi menyusul runtuhnya rejim pemerintahan Orde Baru, tanpa banyak kita sadari pelan-pelan

satu demi satu semua itu nyaris terlepas semakin jauh dari genggaman tangan-tangan kita sebagai bangsa. Betapa tidak, jika-lau sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat kini kita ternyata tidak lagi benar-benar memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari beragam bentuk tekanan kekuatan eksternal; tidak lagi sungguh-sungguh memiliki kemampuan untuk menentukan nasib sendiri dan menjadi "tuan di rumah sendiri"; tidak lagi benar-benar memiliki kemerdekaan dan kedaulatan untuk mengurus rumah tangga sendiri; tidak lagi sungguh-sungguh memiliki kontrol atas beragam sumberdaya yang kita miliki; dan tidak lagi benar-benar hanya tunduk kepada kekuasaan sendiri. Lebih dari semua itu, sebagai suatu bangsa yang hidup di bawah kerangka suatu negara kesatuan, kita bahkan tidak lagi dapat mendaku sebagai bangsa yang benar-benar bersatu di dalam mengatasi perbedaan-perbedaan antar sesama warganya; tinggal bersama di dalam suasana damai di dalam wilayah historis yang tunggal sebagai tanah tumpah darah yang sama; tidak lagi benar-benar memiliki hak yang sama di muka hukum; dan, di atas semua itu, tidak lagi sungguh-sungguh memiliki dan menganut "kebudayaan publik" yang sama.

Demikian dahsyatnya semua itu telah terjadi di hadapan kita sehingga kita bahkan nyaris tidak lagi memiliki alasan untuk menaruh keberatan terhadap pernyataan seorang penulis muda ilmu politik yang oleh kekecewaannya terhadap semua itu tidak dapat menahan diri untuk menyebut satu-satunya bangsa yang kita miliki dan kita cintai ini sebagai "bangsa yang menyebalakan". Bagaimana mungkin kita menyatakan keberatan kita terhadap ungkapan kekecewaan tersebut jikalau nyaris setiap hari kita menyaksikan di hadapan mata telanjang kita terjadinya apa yang oleh Heilbroner (1976) dalam bukunya berjudul *An Inquiry Into The Human Prospect*, yang semula dimaksudkan untuk menggambarkan "schizophrenia" yang dialami oleh masyarakat Amerika Serikat pada pertengahan dasawarsa 1970-an itu, kini ternyata nyaris merupakan gambaran yang sangat sempurna dari simptom-simptom "schizophrenia" yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat Indonesia. Simptom-simptom tersebut, mengikuti klasifikasi Heilbroner, dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis simptom berikut. Simptom pertama, yang menurutnya disebut sebagai simptom yang bersifat "topical", antara lain meliputi: eksplosif tindakan kekerasan yang bersifat mas-

sif di jalan-jalan raya dan di masyarakat, kerusuhan rasial atau etnik di berbagai daerah, pengeboman tempat-tempat umum, dan pembunuhan banyak orang yang tidak berdosa, yang melalui peliputan televisi dan media massa yang lain telah menciptakan citra barbarisme di balik penampilan masyarakat kita yang di atas permukaan kehidupan sehari-hari tampak santun dan demokratis. Yang lebih penting dari semua simptom "topical" tersebut, oleh karena makna dan pengaruhnya yang lebih besar bagi eksistensi dan kelangsungan hidup masyarakat kita, berupa kegagalan generasi usia-menengah masyarakat kita untuk mewariskan kepada anak-anak mereka nilai-nilai budaya yang telah menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang selama ini kita anggap sangat terhormat di dalam pergaulan internasional. Konsumsi "napsa" atau "narkoba" secara massif, pelanggaran atau rileksasi perilaku seksual yang kelewat ekstrim, pemakaian mode-mode pakaian yang sangat tidak konvensional, dan fenomena "dropping out" yang terjadi semakin marak akhir-akhir ini merupakan pengungkapan-pengungkapannya yang semakin nyata.

Simptom yang kedua, disebut Heilbroner sebagai serangkaian

perubahan-perubahan sikap yang paling sedikit terjadi dalam bentuk perubahan-perubahan di dalam dua struktur kesadaran yang terpendam sangat mendalam di dalam sensibilitas masyarakat Indonesia saat ini: yang pertama berupa hilangnya kepercayaan akan kepastian jalannya peristiwa-peristiwa sosial di masa mendatang; sementara yang kedua berupa semakin merosotnya kepercayaan masyarakat akan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang kini semakin banyak menghasilkan terjadinya ancaman bagi kelestarian lingkungan kehidupan masyarakat kita. Simptom yang ketiga muncul dalam bentuk terjadinya "malaise" peradaban yang dialami oleh masyarakat kita, berupa ketidakmampuan peradaban masyarakat kita untuk menghasilkan kelimpahan atau kemakmuran material yang pada saat yang sama juga menghasilkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kehidupan spiritual. Dengan semua itu saya sama sekali tidak ingin mendiskreditkan keberhasilan masyarakat kita di dalam menghadirkan banyak capaian, terutama dalam bidang ekonomi yang berskala cukup kolosal. Sebaliknya, melalui pernyataan tersebut saya hanya ingin menyampaikan kerisauan saya oleh karena kelimpahan ekonomi yang selama ini

berhasil kita capai bersama pencapaian "*a sense of elan and purpose*", pada saat yang sama ternyata kini terjadi bersamaan dengan semakin hilangnya landasan pembenaran dan legitimasi etis dan sosial yang jelas.

Di atas semua itu kita bahkan masih dapat menambahkan tiga buah simptom *schizophrenia* lain yang menandai "ketidakwawasan" masyarakat Indonesia saat ini. Pertama, kini memang tidak ada seorang pun di Indonesia yang dapat menyangkal bahwa di atas permukaan pengungkapan lahiriah, masyarakat Indonesia semakin rajin melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengagungkan asma Tuhan Sang Maha Pencipta, namun pada saat yang sama masyarakat kita ternyata juga telah menjadi salah satu diantara masyarakat yang paling korup di seluruh permukaan bumi. Kedua, sebagai akibat dari keberhasilan program pendidikan moral yang kita selenggarakan selama ini, masyarakat Indonesia juga telah menjadi semakin santun, ketika pada saat yang sama juga telah menjadi semakin "barbarian" dan berselera rendah di dalam memperlakukan karunia Tuhan yang sangat indah: tubuh kita. Ketiga, dan yang tidak kalah pentingnya, melalui keberhasilan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masya-

rakat Indonesia juga telah jauh berkembang menjadi sebuah masyarakat yang bukan hanya sangat rasional akan tetapi juga sangat cerdas, namun pada saat yang sama kita menjadi semakin akrab bergaul dengan makhluk-makhluk dari "dunia lain".

Pertanyaan yang segera muncul di hadapan kita adalah ini: apa makna semua itu jikalau bukan pertanda sangat jelas dari merosotnya wawasan kebangsaan kita? Mengapa semua itu dapat terjadi? Kekuatan-kekuatan apa saja yang telah bekerja di belakang semakin merosotnya wawasan kebangsaan yang di masa silam bukan hanya telah berhasil mempersatukan beragam masyarakat sub-nasional di seluruh wilayah Nusantara dan membebaskan mereka dari kekuasaan rejim kolonial, akan tetapi bahkan telah berhasil mengantarkan kelahiran bangsa dan negara Republik Indonesia, satu-satunya bangsa dan negara yang kita miliki dan kita cintai? Bagaimana kita harus menyikapinya? Bagaimana di bawah tekanan ekspansi globalisasi dan kebangkitan kembali politik aliran saat ini, jikalau penyebutan keduanya benar adanya, wawasan kebangsaan yang selama ini kita miliki harus kita rumuskan kembali? Apa pula yang harus kita lakukan untuk mewujudkannya di dalam praksis ke-

hidupan kita sebagai bangsa?

Itulah pertanyaan-pertanyaan sangat mendasar yang sedang dan akan semakin nyata kita hadapi, dan yang jawabnya akan sangat menentukan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa. Itulah pula pertanyaan-pertanyaan sangat mendasar yang ingin saya bahas melalui penyajian tulisan ini. Dimulai dari pembahasan singkat tentang konteks global terjadinya erosi wawasan kebangsaan yang tengah kita hadapi saat ini, berturut-turut penyajian ini lebih jauh akan membahas beberapa pokok bahasan berikut: globalisasi dan menurunnya otonomi dan legitimasi negara, gerakan reformasi dan kebangkitan kembali politik aliran, dan meningkatnya kesenjangan atau defisit kewarganegaraan, dan pencarian solusi untuk membangun dan menguatkan wawasan kebangsaan, sebelum keseluruhan penyajian ini akan ditutup dengan pembahasan tentang imperatif pentingnya reposisi peran perguruan tinggi.

Globalisasi dan Merosotnya Otonomi dan Legitimasi Negara

Kini perkenankan saya memulainya dengan mengungkapkan kehadiran sebuah kekuatan atau faktor sangat penting yang telah menjadi sumber sangat

dahsyat dari terjadinya kemerosotan wawasan kebangsaan yang selama ini telah berhasil menjadi salah satu fondasi sangat penting dari tertib dan integrasi masyarakat Indonesia. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih seksama mengenai hal itu, kita perlu memahami dengan lebih seksama pula tentang tantangan perubahan-perubahan global yang tengah kita hadapi saat ini, dan yang membedakannya dari tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada awal kelahirannya. Salah satu isu sangat penting yang harus kita pahami adalah bahwa kelahiran wawasan kebangsaan waktu itu dilakukan di hadapan tantangan hadirnya ancaman kapitalisme dunia dari era yang oleh Robertson (2003) disebut sebagai era globalisasi gelombang pertama dan kedua, dan yang oleh Gelin (2003) disebut sebagai era merkantilisme dan era ekspansi kapitalisme kolonial yang memiliki karakter dan dinamika yang sangat berbeda dari karakter dan dinamika globalisasi gelombang ketiga yang tengah dan akan kita hadapi saat ini dan di masa depan. Kedua, pada saat yang sama, kita perlu melakukan penilaian kritis dan lebih jernih tentang implikasi ekspansi globalisasi gelombang ketiga bagi negara-negara di Dunia Ketiga, terutama implikasinya bagi integrasi

masyarakat Indonesia yang sangat majemuk itu.

Sebagaimana kita ketahui, logika yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari ideologi neo-liberalisme, yang di dalam filsafat politik kontemporer memiliki afinitasnya dengan ideologi libertarianisme yang direntang melampaui batasnya yang ekstrim (Kymlycka, 1999: 95). Seperti halnya dengan libertarianisme yang membela kebebasan pasar dan menuntut pembatasan peran negara, neo-liberalisme percaya pada pentingnya institusi pemilikan privat dan efek distributif dari ekspropriasi kemakmuran yang tidak terbatas oleh korporasi-korporasi transnasional, pada superioritas hukum pasar sebagai mekanisme distribusi sumberdaya, kekayaan dan pendapatan yang paling efektif, dan pada keunggulan pasar bebas sebagai mekanisme-mekanisme sangat penting untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan semua orang dan individu (Gelin, *op. cit.*, 2003: 24).

Bekerja melalui regulasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga multilateral dalam bidang perdagangan, keuangan dan investasi di tingkat global, perlahan-lahan akan tetapi pasti, segala sesuatu yang memiliki nilai tidak dapat lagi dipertahankan dari proses

komodifikasi dan komersialisasi: tidak juga air, bahan pangan, kesehatan, karya seni, dan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Semua itu terjadi terutama melalui proses marjinalisasi kekuasaan dan otoritas negara-negara Dunia Ketiga di dalam pengaturan ekonomi nasional mereka, yang terjadi dalam lima tahapan perkembangan berikut: (1) deregulasi sistem keuangan internasional Bretton Woods, yang terjadi sejak tahun 1971, dan yang telah mengubah semua aset keuangan dunia ke dalam bentuk kapital spekulatif; (2) deregulasi ekonomi Dunia Ketiga secara sistematis dan bertahap, yang terjadi sejak tahun 1980-an melalui program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) di bawah pengawalan IMF dan Bank Dunia untuk mengintegrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem pasar global; (3) deregulasi *stock markets* yang terjadi sejak tahun 1986 untuk mengatur deregulasi semua *stock markets* di seluruh dunia; (4) deregulasi produksi pertanian dan komersialisasi pelayanan-pelayanan yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian internasional; dan (5) proliferasi kemudahan-kemudahan pajak dan perbankan (*tax and banking havens*) sejak pertengahan tahun 1990-an, yang telah

menghasilkan separuh dari seluruh aliran keuangan dunia terjadi melalui kemudahan-kemudahan bebas hambatan dari semua bentuk kendala legal oleh karena kekuasaan publik mengikuti ketidakpedulian kebijakan-kebijakan publik (Gelinis, *ibid.*, 2003: 31; baca pula Sofian Effendi, 2004).

Semua itu telah menyebabkan apa yang kini lebih dikenal sebagai globalisasi neo-liberal itu secara mendasar memiliki dinamika dan implikasi yang sangat berbeda dari dinamika dan implikasi globalisasi gelombang pertama dan kedua. Jikalau di era globalisasi gelombang pertama dan kedua ekstraksi kekayaan negara-negara sedang berkembang dilakukan dengan menggunakan mekanisme "akumulasi primitif" melalui beragam bentuk kekerasan fisik yang terbuka seperti penaklukan dan kolonisasi, perampokan dan perbudakan, serta eksploitasi pertanian dan perdagangan antar benua, maka di era globalisasi gelombang ketiga ekstraksi kekayaan negara-negara Dunia Ketiga dilakukan melalui cara-cara yang sangat lembut dan tersembunyi berdasarkan regulasi sistem perdagangan internasional yang di atas permukaan tampak sangat bebas dan demokratis, akan tetapi yang di bawah permukaan sesungguhnya se-

ringkali jauh lebih eksploitatif dan sama sekali tidak adil.

Tidak mengherankan oleh karenanya jikalau ekspansi globalisasi gelombang ketiga ke seluruh sudut bumi telah menjadikan masyarakat dan negara-negara sedang berkembang di Dunia Ketiga tidak lebih daripada sebagai "daerah kumuh" atau kawasan *slum* dari negara-negara industri maju yang harus mengakomodasi 4 sampai 6 milyar jumlah penduduk dunia di dalam kondisi kemiskinan yang berat; pendapatan per kapita per tahun mereka mengalami penurunan dari keadaan 10, 15, 20 dan bahkan 30 tahun yang lalu; 2,8 milyar penduduk mereka hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per kapita per hari; sementara 1,3 milyar diantara mereka bahkan hidup dengan tingkat konsumsi kurang dari 1 dollar AS (Gelinias, *op.cit.*, 2003: 165-166). Laporan statistik UN *Human Development Report* tahun 1996 (Tehrani, 1999: 157) menguatkan semua itu dengan menunjukkan semakin menguatnya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi dunia melalui penyajian statistik berikut: 20 persen penduduk terkaya di dunia menerima lebih dari 82 persen pendapatan dunia, sementara 20 persen penduduk paling miskin di dunia hanya menerima 1,4 persen. Lebih dari itu, mere-

ka harus mengalami semua itu sambil menyaksikan bagaimana, perlahan-lahan akan tetapi pasti, perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah mereka harus dilakukan di bawah tekanan kepentingan-kepentingan korporasi-korporasi transnasional.

Tidak mengherankan pula oleh karenanya jikalau keberhasilan globalisasi gelombang ketiga yang telah membawa perkembangan peradaban umat manusia ke tingkat yang selama ini tidak pernah terbayangkan, harus berjalan seiring dengan terjadinya penurunan legitimasi kekuasaan negara yang selama ini merupakan salah satu di antara beberapa institusi "*governance*" yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan negara-negara sedang berkembang di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Di dalam ungkapan Noreena Hertz (2003) dalam *The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy*, perlahan-lahan akan tetapi pasti kita tengah menyaksikan di seluruh dunia terjadinya pengambilalihan kekuasaan negara oleh kekuatan korporasi-korporasi transnasional (*transnational corporations*). Pernyataan Noreena Hertz mengukuhkan argumen John Madeley (1999, 2000 dan 2002), Samir Amin (2000), Martin Khor (2002), Walden Bello (2002), Oswaldo de

Rivero (2001), dan Jacques B. Gelinias (2003), bahwa di bawah tekanan globalisasi finansial, perdagangan, dan investasi, kita tengah menyaksikan di mana-mana di seluruh dunia terjadinya "globalisasi pengambilan keputusan-keputusan dalam perumusan kebijakan" (*globalization of policy-making*), yang pada gilirannya telah menyebabkan banyak pemerintah dan rakyat mereka tidak lagi memiliki otonomi di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan nasional mereka. Sebaliknya, yang tengah kita saksikan semakin transparan di hadapan kita adalah bahwa perumusan kebijakan-kebijakan nasional di banyak negara di mana-mana di seluruh dunia semakin kuat dikendalikan oleh tekanan kekuatan-kekuatan eksternal, untuk menyebut tiga kekuatan global yang oleh Richard Peet (2003) disebut sebagai "Trinitas Maha Tidak Khudus" (*Unholy Trinity*), yakni IMF (*International Monetary Fund*), WB (*World Bank*) dan WTO (*World Trade Organization*), tiga kekuatan ekonomi-politik sangat berpengaruh yang kini mengatur hampir setiap tarikan nafas kehidupan umat manusia di seluruh permukaan bumi.

Di negara-negara Dunia Ketiga, tidak terkecuali di Indonesia, kompleksitas perubahan-perubahan tersebut bahkan telah

diperumit oleh munculnya ketegangan diantara dua kelompok kekuatan yang saling berhadapan satu sama lain. Kelompok kekuatan yang pertama terdiri atas kekuatan-kekuatan masyarakat pada tingkat nasional dan lokal yang, sebagai konsekuensi dari infeksi virus globalisasi, berlomba dan bersaing untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumberdaya yang menggerakkan dinamika perubahan pada tingkat global. Kelompok kekuatan yang kedua, yang melihat ekspansi globalisasi kapitalisme neo-liberal sebagai bentuk kolonialisme baru yang mengancam eksistensi dan otonomi masyarakat negara-negara Dunia Ketiga, mengungkapkan respons mereka melalui kebangkitan beragam bentuk gerakan "politik identitas" (*identity politics*): untuk menyebut antara lain gerakan-gerakan nasionalisme kesukuan, gerakan fundamentalisme keagamaan, dan gerakan nativisme sebagai beberapa di antaranya yang paling penting (baca: Samir Amin, 2000: 101-103 dalam *Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society*). Sebagaimana yang akan diuraikan lebih jauh pada subtema kelima penyajian ini, keadaan yang demikian akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan atau defisit kewarganegaraan, yang pada gilirannya akan

berakibat pada menurun dan melemahnya wawasan kebangsaan.

Globalisasi, Politik Aliran, dan Meningkatnya Defisit Kewarganegaraan

Jikalau sumber yang pertama dari terjadinya erosi wawasan kebangsaan yang tengah kita alami saat ini bersumber di dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan global, maka sumbernya yang kedua berakar sangat mendasar di dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan internal masyarakat Indonesia sendiri. Pada tingkat permukaan, kekuatan yang dimaksud terutama kita temukan di dalam munculnya ketegangan-ketegangan yang terjadi di antara berbagai kekuatan politis-ideologis dan diantara kekuatan pusat dan daerah, yang melalui bekerjanya otoritarianisme birokratik dan korporatisme negara yang dipraktekkan sepanjang era pemerintahan Orde Baru dapat ditekan ke bawah permukaan. Sama seperti runtuhnya Uni Soviet telah menghasilkan munculnya ketegangan dan konflik diantara berbagai peradaban (*the clash of civilizations*) di atas perbedaan-perbedaan ideologi agama (Huntington, 1996), maka jatuhnya rejim Orde Baru di bawah pemerintahan Suharto telah menghasilkan munculnya ketegangan-ketegangan dan

konflik-konflik diantara berbagai kekuatan "politik aliran". Sama seperti runtuhnya Uni Soviet telah mentransformasikan ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik yang terjadi antara negara-negara Blok Barat dan Blok Timur menjadi konflik domestik di negara-negara sedang berkembang, maka jatuhnya otoritarianisme sistem politik dan korporatisme negara di bawah kekuasaan Orde Baru juga telah mentransformasikan ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik antar elit di tingkat nasional menjadi ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik yang terjadi diantara beragam kekuatan politik dan ideologi di berbagai daerah, diantara kekuatan-kekuatan dan kepentingan-kepentingan pusat dan daerah, dan di antara kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas suku bangsa dan/atau agama.

Semua itu pada gilirannya telah menyebabkan kesulitan lebih besar yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah masyarakat bekas jajahan yang bersifat sangat majemuk, berupa ketidakmampuannya untuk membangun dasar-dasar dari suatu sistem demokrasi di atas pluralisme etnis, agama dan kebudayaan. Demikianlah, sesudah lebih dari 50 tahun hidup di dalam era kemerdekaan, dan menyebut dirinya se-

bagai sebuah bangsa yang modern, masyarakat Indonesia ternyata masih belum berhasil membebaskan dirinya dari kehidupan sebuah masyarakat bekas jajahan yang oleh Furnivall (1956) disebut sebagai masyarakat majemuk yang terdiri atas dua atau lebih kelompok, komunitas, atau tertib sosial yang hidup sendiri-sendiri tanpa mengalami pembauran ke dalam satu kesatuan politik yang utuh oleh tiadanya "ketunggalan kehendak" (*common will*) masyarakat; yang di dalam kehidupan ekonomi mengungkapkan dirinya di dalam tiadanya "kesamaan permintaan sosial" (*common social demand*); dan yang di dalam kehidupan politik menyatakan dirinya di dalam tidak adanya kemampuan untuk membangun "institusi-institusi koalisi" dan "brokerage" (Rabuska dan Shepsle, 1977).

Sebagai akibatnya, meskipun pada tingkat ekonomi pada tahun 1997 bangsa Indonesia sudah berhasil memperoleh pengakuan Bank Dunia sebagai salah satu dari lima "kekuatan besar ekonomi baru" yakni Cina, India, dan Indonesia di Asia, Brazil di Amerika Latin, dan Rusia di Eropah (Bessis, 2003: 145), ia ternyata masih belum memiliki kemampuan yang nyata untuk membangun konsensus nasional di atas nilai-nilai fundamental

(a.l.: nilai-nilai kebangsaan) yang sama, sehingga integrasi masyarakat Indonesia pada tingkat nasional seringkali hanya dapat dibangun di atas dominasi suatu kelompok yang mampu memaksakan kehendaknya atas kelompok-kelompok sosial yang lain, dan konflik antar kelompok mudah sekali terbakar, sementara resolusinya seringkali harus dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen kekerasan. Sebagai implikasinya lebih jauh, meskipun pada tingkat politik bangsa Indonesia telah berulang kali berhasil melakukan transisi demokrasi pada tingkat formal, namun legitimasinya selalu problematik oleh karena pada tingkat substantif kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah senantiasa dinilai hanya menghasilkan "public goods" bagi kelompok atau golongan masyarakat tertentu dan sebaliknya merupakan "public bads" bagi kelompok-kelompok dan golongan masyarakat yang lain. Meminjam ungkapan Rabushka dan Shepsle (*op.cit.*, 1972), sebagaimana sudah disebutkan di muka, semua itu terjadi oleh karena kesulitan-kesulitan masyarakat Indonesia untuk membangun institusi-institusi koalisi yang secara efektif dapat memainkan fungsi "brokerage". Yang terjadi kemudian sebagai akibatnya adalah transformasi

dari suatu "pergumulan untuk melakukan ekstraksi" (*a game of extraction*) menuju suatu "pergumulan untuk melakukan pembagian" (*a game of division*), yang pada gilirannya telah menciptakan munculnya tekanan-tekanan bagi perkembangan wawasan kebangsaan. Sama seperti yang terjadi sebagai akibat ekspansi globalisasi telah menyemai-kan terjadinya kesenjangan atau defisit kewarganegaraan (*citizenahip gap* atau *citizenship deficit*), maka kebangkitan kembali politik aliran atau politik identitas juga telah mendorong semakin melebarnya kesenjangan atau defisit kesadaran kewarganegaraan di kalangan masyarakat Indonesia pula.

Demikian dahsyatnya tekanan kedua kekuatan itu, sehingga yang telah terjadi di Indonesia saat ini adalah berkembangnya *schizophrenia* struktur kesadaran masyarakat Indonesia. Di satu sisi, oleh keberhasilan ideologisasi dan mistifikasi gaya hidup neoliberal, kita menyaksikan semakin banyak orang Indonesia menjadi sangat percaya bahwa perbaikan kehidupan ekonomi dan politik kita sebagai bangsa akan sangat tergantung pada integrasi masyarakat dan ekonomi Indonesia ke dalam sistem global. Pada saat yang sama, oleh semakin menguatnya penetrasi dan dominasi kekuatan kor-

porasi-korporasi transnasional kita juga menyaksikan semakin menguatnya ikatan nilai-nilai dan norma-norma primordial-partikularistik ke tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak pelak lagi jikalau keduanya, yakni semakin meluasnya gaya hidup neoliberal dan menguatnya ikatan nilai-nilai primordial-partikularistik, telah dan tengah bekerja menghalangi berkembangnya komitmen kewarganegaraan yang justru sangat diperlukan bagi terjadinya konsolidasi demokrasi.

Interaksi antara kedua kekuatan atau faktor itulah yang, sebagaimana sudah diuraikan di atas, telah dan tengah bekerja sangat sistematis di belakang terjadinya erosi wawasan kebangsaan yang sedang kita hadapi saat ini. Bersama-sama atau sendiri-sendiri keduanya secara sistematis telah dan tengah bekerja sangat efektif untuk memisahkan dan menghadapkan satu sama lain mereka yang perspektif dan kepentingan-kepentingannya bersumber di dalam semangat dan solidaritas nasional, dari mereka yang perspektif dan kepentingan-kepentingannya semakin menyatu dengan perspektif dan kepentingan-kepentingan internasional dan primordial. Secara sangat sistematis pula keduanya telah dan sedang bekerja untuk mempersulit ber-

fungisinya nilai-nilai, institusi-institusi, dan aparatus-aparatus nasional di dalam mengendalikan perilaku masyarakat Indonesia sebagai bangsa, dan sebaliknya memperkuat berfungsinya nilai-nilai, institusi-institusi, dan aparatus-aparatus global yang sangat pragmatis, dan nilai-nilai, institusi-institusi dan aparatus-aparatus lokal yang bersifat primordial. Keduanya tengah menyemaikan apa yang oleh Alison Brysk (2002: 10-11) disebut sebagai "kesenjangan kewarganegaraan" (*the citizenship gap*), atau apa yang untuk tujuan memberikan tekanan pada implikasinya bagi pengembangan dan penguatan wawasan kebangsaan saya sebut sebagai "defisit kewarganegaraan" (*the citizenship deficit*).

Dengan semua itu tidak terlalu sulit bagi siapa pun untuk memahami mengapa pada saat bangsa ini tengah mendorong terjadinya proses konsolidasi demokrasi, kita justru menyaksikan semakin maraknya anomali-anomali kehidupan sebuah bangsa yang merdeka dan demokratis, yang kelahirannya merupakan hasil dari perlawanan terhadap kekuasaan kolonialisme dan imperialisme. Maka terjadilah, di dalam ranah kehidupan ekonomi kita, apa yang seharusnya tidak boleh lagi dibiarkan semakin berkembang di

negeri ini: yakni semakin menguatnya penghambaan pada superioritas kekuatan ekonomi internasional, dan sebaliknya semakin melemahnya kebanggaan terhadap kekuatan ekonomi nasional. Maka terjadilah, di dalam ranah kehidupan politik kita, apa yang seharusnya tidak boleh lagi terjadi pula di negeri ini: yakni konflik sosial dan politik berbasis primordialisme dan kerusuhan-kerusuhan berdarah nyaris di seluruh negeri ini, seperti yang telah terjadi di Timor Timur, di Aceh, di Maluku, di Papua, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, di Sulawesi Tenggara, dan di tempat-tempat yang lain nyaris di seluruh permukaan peta Indonesia akhir-akhir ini. Adalah merupakan sebuah ironi yang sungguh sangat menyedihkan bahwa di tengah gempitanya proses konsolidasi demokrasi yang tengah kita lakukan saat ini, perbedaan kepentingan-kepentingan ideologi dan politik di negeri ini ternyata masih harus dilakukan melalui tindakan-tindakan pemaksaan dan kekerasan, yang telah mengambil korban banyak jiwa dan mencederai banyak orang yang tidak berdosa. Maka terjadilah, di dalam ranah kehidupan budaya kita, apa yang seharusnya tidak boleh dibiarkan semakin berkembang pula, berupa semakin

hilangnya identitas kebudayaan nasional kita: mulai dari gaya hidup kita, cara kita bertutur kata atau berbahasa, cara kita makan, cara kita berbusana, cara kita mengungkapkan apresiasi seni kita, dan cara kita memilih arsitektur rumah kita yang tidak lagi mencerminkan identitas dan kepribadian bangsa kita, bahkan sampai dengan cara kita menenggang sesama, cara kita mengungkapkan potensi diri kita, dan cara kita memperjuangkan kepentingan-kepentingan kita yang sering kali kita lakukan sambil saling menginjak kaki dan bahkan kepala orang lain.

Mencari Solusi, Memperkuat Wawasan Kebangsaan

Sebuah pertanyaan sangat mendasar segera mengusik kesadaran kita. Di hadapan semakin maraknya perlombaan gaya hidup ultramodern dan semakin kuatnya tekanan perubahan-perubahan global dan kebangkitan kembali politik aliran yang tengah kita hadapi saat ini, bagaimana solusi dari semua itu harus kita temukan di masa mendatang? Jikalau sejak awal kita percaya bahwa pasang-surutnya wawasan kebangsaan tidak pernah terjadi tanpa antisiden, maka secara teoritik jawaban atas pertanyaan itu juga harus kita temukan di dalam bekerjanya sejumlah antisiden yang per-

lu dan harus kita kondisikan kehadirannya pula melalui perumusan dan pelaksanaan sejumlah kebijakan pembangunan nasional. Diantara semua pilihan kebijakan tersebut di atas, kebijakan reposisi dan revitalisasi peran lembaga pendidikan, terutama reposisi dan revitalisasi lembaga pendidikan tinggi merupakan sebuah imperatif. Ini sangat penting mengingat keunggulan suatu negara tidak hanya bersumber di dalam keunggulan politik dan ekonominya, melainkan lebih-lebih dan terutama di dalam keunggulan "insight" warga negaranya, yang dari pengalaman banyak masyarakat merupakan fungsi dari keberhasilan sistem pendidikan sebagai "culture-conserving" dan "culture-creating institution". Sebagaimana yang dikatakan dengan sangat kuatnya pula oleh Hutchinson dan Smith (1994) dalam bukunya berjudul *Nationalism, "the glory of a country comes not from its political power but from its people and the contribution of its thinkers and educators to humanity"*.

Dalam konteks semua itu terdapat dua jenis antisiden yang secara teoritik dapat mempengaruhi pasang surutnya perkembangan wawasan kebangsaan: yang pertama berupa berbagai jenis antisiden yang bersifat eksidental dan tidak berada

di dalam kapasitas siapa pun untuk mengendalikannya, sementara yang kedua berupa beragam antisiden yang berada di dalam kapasitas kita untuk mengendalikannya. Di dalam kaitannya dengan jenis antisiden yang kedua itulah perhatian kita untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan di atas harus kita temukan. Sejauh pengalaman banyak negara di dunia, jenis antisiden yang dimaksud terutama masih harus ditemukan di dalam tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara (baca: pemerintah). Ada tiga situasi di mana tindakan-tindakan dan/atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh negara dapat mempengaruhi pasang-surutnya perkembangan wawasan kebangsaan. Pada situasi yang pertama tindakan dan/atau kebijakan-kebijakan negara dapat mempengaruhi pasang-surutnya perkembangan wawasan nasional melalui ketidakpedulian (*ignorance* atau *inaction*) dari para pejabat negara. Itulah yang akhir-akhir ini seringkali dituduhkan telah dilakukan oleh para pejabat negara kita. Mereka boleh jadi memang mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan wawasan kebangsaan bagi kesejahteraan seluruh warga negara, akan tetapi oleh karena alasan kepenting-

an untuk melestarikan otoritas yang berada di dalam genggaman tangan mereka ternyata tidak mereka lakukan.

Pada situasi yang kedua tindakan dan/atau kebijakan-kebijakan negara dapat mempengaruhi pasang-surutnya perkembangan wawasan kebangsaan melalui ketidakmampuan (*incompetence*) para pejabat negara. Mereka boleh jadi bukan hanya memahami akan tetapi bahkan banyak memutuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, namun semua itu mereka lakukan tanpa kompetensi yang memadai, baik di dalam perumusan pemahaman mereka maupun di dalam melakukan pilihan-pilihan kebijakan yang mereka lakukan. Tentang hal itu, hasil pengamatan Hutchinson dan Smith sangat menarik untuk diperhatikan, bahwa 90 persen dari kegagalan kebijakan negara untuk mengembangkan wawasan kebangsaan pada umumnya justru terjadi oleh karena ketidakmampuan para aparat negara yang dimilikinya. Pada situasi yang ketiga, pasang-surutnya perkembangan wawasan kebangsaan sangat dipengaruhi oleh "jenis kebijakan" yang diambil oleh negara. Ada dua jenis kebijakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan wa-

wasan kebangsaan: yang pertama berupa "kebijakan-kebijakan umum" tentang pembangunan politik, sementara yang kedua merupakan "kebijakan-kebijakan khusus" yang secara khusus didesain untuk meningkatkan wawasan kebangsaan. Jenis kebijakan yang pertama membedakan antara kebijakan pembangunan sistem politik demokratik versus pembangunan otoritarianisme politik; atau kebijakan desentralisasi versus sentralisasi sistem politik. Jenis kebijakan yang kedua meliputi kebijakan-kebijakan khusus tentang kewarganegaraan, kebijakan tentang hak-hak sipil dan hak-hak bagi kelompok minoritas, kebijakan-kebijakan kultural dalam bidang kehidupan beragama, pendidikan, dan bahasa, dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang secara khusus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau sebaliknya lebih memihak pada kepentingan dan perspektif kelompok-kelompok tertentu.

Untuk memahami dengan lebih seksama tentang bagaimana berbagai jenis tindakan atau kebijakan negara mempengaruhi pasang-surutnya perkembangan wawasan kebangsaan, kita perlu memahami lebih cermat pula bahwa wawasan kebangsaan bukan hanya menyangkut domain kehidupan politik seperti yang biasa kita pahami selama

ini, melainkan juga menyangkut domain kehidupan kultural. Jika-lau pada tingkat politik wawasan kebangsaan memahami dan menginginkan suatu kehidupan politik kewargaan (*a civic polity*) yang dipersatukan oleh suatu sistem hukum, maka pada tingkat kultural wawasan kebangsaan melihat esensi sebuah negara sebagai suatu peradaban yang unik (*distinctive civilization*) yang merupakan produk dari dan dipelihara oleh sejarah, kebudayaan, serta profil geografis unik tertentu. Berlawanan dengan wawasan kebangsaan pada tingkat politik yang cenderung mengidealisasikan terbentuknya aparatus-aparatus yang tersentralisasi agar dapat memobilisasikan berbagai kelompok demi terwujudnya tujuan nasional yang tunggal, tujuan yang diinginkan oleh wawasan kebangsaan pada tingkat atau domain kultural kita temukan dalam bentuk regenerasi moral dari komunitas historis dan penciptaan kembali peradaban nasional yang unik itu.

Keunggulan kehidupan politik di atas dukungan keunggulan sistem ekonomi sebagai pengungkapan atau ekspresi instrumentalnya, jelas tidak diharamkan oleh mereka yang menganut wawasan kebangsaan pada tingkat kultural. Akan tetapi jikalau kebijakan pengembangan wawasan kebangsaan kita

harapkan akan benar-benar menemukan keberhasilan pengungkapannya, maka keunggulan politik dan ekonomi tersebut harus dibangun sebagai keunggulan atau ekspresi dari keunggulan kebudayaan kita sebagai bangsa. Sebagaimana yang sudah disampaikan di atas, sekali lagi mengutip pernyataan Hutchinson dan Smith, "kebesaran sebuah negara tidak terutama terjadi oleh karena kekuatan politiknya, akan tetapi oleh karena kekuatan kebudayaan yang dianut oleh warganegaranya dan oleh sumbangan para pemikir serta pendidiknya bagi kemanusiaan".

Sebagaimana yang sudah disyaratkan di dalam penyajian di atas, diantara berbagai jenis kebijakan yang berada di ranah kebudayaan antara lain dapat kita temukan meliputi kebijakan-kebijakan yang berada dalam kawasan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan bahasa, termasuk pula kebijakan-kebijakan kebudayaan yang berada di ranah kehidupan ekonomi. Di ranah keagamaan, misalnya, kebijakan-kebijakan itu harus dirancang dan ditujukan untuk mengembangkan kehidupan keagamaan yang berbasis pada pemahaman teologis yang bukan hanya tidak membatasi akan tetapi lebih-lebih memfasilitasi aktualisasi potensi-potensi ke-

manusiaan umat, yang bukan memenjarakan melainkan mencerahkan kehidupan umat, dan yang tidak memahami Tuhan berada jauh tinggi di atas langit dan tidak terjangkau oleh manusia, melainkan Tuhan yang berada sangat dekat di dalam proses sejarah melalui praktek-praktek cinta kasih diantara sesama manusia (baca: Baum, 1975). Sebuah catatan sangat penting perlu diberikan ketika kita berbicara tentang kebijakan pembangunan wawasan kebangsaan di ranah kehidupan keagamaan, oleh karena alih-alih akan dapat menyemaiakan tumbuhnya wawasan kebangsaan yang "universalistik" dan inklusif, kebijakan di ranah keagamaan yang tidak dilakukan dengan benar sebaliknya seringkali justru dapat menghasilkan semakin berseminya wawasan kebangsaan yang "partikularistik" dan eksklusif. Sumbernya pada umumnya berakar di dalam kecenderungan kita untuk meyakini bahwa sebagai wakil Tuhan di dunia (baca: sebagai makhluk yang diciptakan menurut citra Tuhan atau sebagai *khlaiyah fil ardi*), kita seringkali mendaku diri telah menguasai dengan sempurna pemahaman tentang "kebenaran Tuhan" sehingga merasa berhak untuk menilai dan mengadili orang lain atas nama Tuhan.

Di ranah pendidikan, kebijak-

an-kebijakan yang dimaksud haruslah merupakan kebijakan-kebijakan pendidikan yang benar-benar memenuhi janjinya untuk melaksanakan tiga fungsi pendidikan yang paling penting berikut: (1) fungsi "integratif" untuk mengintegrasikan subyek atau anak didik ke dalam berbagai peran okupasional, politik, dan peran-peran orang dewasa yang lain; (2) fungsi "egaliterian" untuk memberikan kepada semua warganegara Indonesia kesempatan untuk memperoleh pendidikan tanpa limitasi sosial dan spasial tempat di mana mereka dilahirkan dan untuk melakukan kontak dengan lingkungan sosial yang lebih luas; dan (3) fungsi "developmental" untuk memberikan kesempatan kepada anak atau subyek didik untuk mengalami perkembangan psikis dan moral mereka yang sangat diperlukan untuk melakukan tanggapan yang seimbang terhadap nilai-nilai kehidupan kuantitatif dan kualitatif (dalam bahasa normatif, baca: untuk menghasilkan keluaran berupa manusia-manusia Indonesia yang lebih utuh). Sangat erat berkaitan dengan kebijakan negara dalam bidang pendidikan adalah kebijakan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam kebijakan negara dalam bidang yang satu ini, prioritas

yang seimbang perlu dikembangkan antara pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat "economizing" dan terutama diorientasikan pada maksimisasi keuntungan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat "sociologizing" yang sebaliknya terutama diorientasikan pada isu keadilan sosial; dan keseimbangan antara pembangunan beragam jenis "teknologi keras" (*hard technologies*) yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan beragam jenis "teknologi lunak" (*soft technologies*) yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan liberasi, demokrasi, dan keadilan sosial.

Di dalam domain lingkungan hidup, kebijakan-kebijakan yang menjadi pilihan prioritas negara harus merupakan kebijakan-kebijakan lingkungan yang secara khusus dan disiplin didesain untuk membangun sistem interaksi antara manusia dan lingkungan (*man-environment interaction*) yang mampu merestorasi dan memelihara lingkungan hidup yang sehat dan memiliki kecenderungan "entropi" yang minimal. Di dalam ranah kehidupan ekonomi, yang seringkali dilakukan dengan perhatian minimal tentang dampaknya terhadap pelestarian lingkungan, kebijakan-kebijakan tersebut haruslah merupakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih sensitif bagi

pemecahan beragam masalah sosial melalui pengembangan *social market economy* (Lachmann, 1995) atau *solidarity economy* (Quintela, 2003), yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk kompromi politik yang memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan aktualisasi prinsip-prinsip pasar bebas (*free markets*) dan kompetisi yang efisien (*efficient competition*) di satu sisi, dengan jaminan bagi kehidupan yang bermartabat bagi semua warganegara (termasuk mereka yang selama ini hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan) pada sisi yang lain.

Daftar tentang ragam kebijakan di atas masih dapat diperpanjang untuk meliputi kebijakan-kebijakan kebudayaan di ranah politik, hukum, dan birokrasi. Di ranah politik kebijakan-kebijakan yang dimaksud harus diarahkan bagi pengembangan sistem politik demokratik yang bukan hanya mengungkapkan dirinya pada dataran prosedural akan tetapi lebih-lebih pada dataran substansial. Di ranah hukum kebijakan-kebijakan yang dimaksud harus merupakan kebijakan-kebijakan yang diorientasikan pada pembangunan sistem hukum yang bukan hanya memberikan jaminan pada hadirnya kepastian hukum, melainkan lebih-lebih pada keseimbangan antara kepastian hukum dan

keadilan seperti yang dianjurkan oleh para ahli filsafat pencerahan (Rostow, 1970). Di ranah birokrasi, kebijakan-kebijakan tersebut harus merupakan kebijakan-kebijakan berwawasan kebudayaan yang diorientasikan pada pembangunan birokrasi yang dengan disiplin bekerja di atas prinsip-prinsip dari suatu sistem manajemen yang bersifat humaniterian, demokratis, dan partisipatoris (*humanitarian, democratic and participatory management system*) di atas dukungan struktur organisasi birokrasi yang fleksibel.

Pentingnya Reposisi Peran Perguruan Tinggi.

Di antara semua pilihan kebijakan itu pilihan kebijakan reposisi, revitalisasi dan penguatan peran lembaga-lembaga pendidikan, terutama peran lembaga pendidikan tinggi, perlu memperoleh catatan khusus oleh karena pentingnya kebijakan tersebut untuk mengkondisikan peluang bagi aktualisasi semua pilihan kebijakan yang lain. Sayangnya, globalisasi ternyata tidak lalai pula telah membuat lembaga pendidikan tinggi tidak luput dari tekanan dampak marginalisasi globalisasi yang semakin keras sejak akhir dasawarsa 1970-an dan awal dasawarsa 1980-an. Demikianlah, terutama sebagai akibat dari penetrasi ek-

spansi globalisasi selama dua atau tiga dasawarsa terakhir, di mana-mana di seluruh dunia (tidak terkecuali di Indonesia) lembaga pendidikan tinggi semakin kehilangan otonominya untuk mewujudkan misi "liberasi" dan "pencerahannya" bagi kehidupan umat manusia. Sebagai konsekuensi dari ekspansi globalisasi yang semakin jauh memasuki hampir semua sendi kehidupan umat manusia, di mana-mana di seluruh permukaan bumi lembaga pendidikan tinggi semakin kehilangan otonomi dan kemampuan mereka untuk mewujudkan hampir semua peran dan fungsi tradisionalnya yang sangat esensial untuk melakukan produksi, preservasi, dan transmisi pengetahuan (Noam, 1995), dan pendidikan moral, sosialisasi keilmuan, kritik sosial, serta sertifikasi profesional dan rekrutmen elit (Tehrani, 1996). Melalui kehadiran revolusi teknologi informasi yang telah menciptakan perubahan-perubahan sangat mendasar di dalam struktur organisasi dan mekanisme kerja lembaga pendidikan tinggi, globalisasi gelombang ketiga bahkan telah menciptakan berbagai paradoks perkembangan lembaga pendidikan tinggi yang selama ini belum pernah terjadi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Noam dan Tehrani, di ba-

wah dukungan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, globalisasi telah berhasil mendorong perkembangan pengetahuan ilmiah pada tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi antara 4 sampai 6 persen tiap tahun, yang berarti telah menghasilkan kelipatan pertumbuhan dua kali hanya dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun. Seperti yang terjadi dalam bidang-bidang yang lain, spesialisasi merupakan mekanisme yang bekerja di belakang perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa itu. Salah satu sebabnya yang sangat penting bersumber di dalam keterbatasan kemampuan finansial dan sumberdaya fisik yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi, sehingga aktualisasi kemampuan para ilmuwan untuk mengembangkan dan menguasai pengetahuan yang semakin banyak mengenai bidang-bidang yang semakin sempit terpaksa harus menemukan solusinya dalam pengembangan jaringan dengan lembaga-lembaga eksternal, seperti lembaga-lembaga "think-tanks", konsultasi, korporasi riset dan pengembangan yang dimiliki oleh berbagai departemen dan lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintah.

Spesialisasi memang jelas merupakan salah satu diantara kekuatan sangat penting bagi

perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi ketika spesialisasi bidang-bidang ilmu pengetahuan berkembang terlalu jauh, apalagi ketika dorongan yang menggerakannya dikendalikan oleh kepentingan korporasi-korporasi transnasional, maka sistem intelektual yang menjadi tempatnya berpijak akan semakin kehilangan kemampuan esensialnya untuk melihat dan menjelaskan hal-hal berikut: (1) deskripsi tentang keseluruhan kerangka kerja ilmu pengetahuan yang menempatkan beragam disiplin ilmu pengetahuan di dalam hubungan mereka satu dengan yang lain; (2) deliniasi tentang apa yang dapat direpresentasikan oleh setiap disiplin ilmu pengetahuan; (3) perkembangan pemahaman (*insights*) tentang kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan kompleksitas sistem paradigmatik yang mendasarinya; dan (4) bagaimana berbagai disiplin ilmu pengetahuan berhubungan satu sama lain ketika mereka diterapkan untuk mengungkapkan masalah-masalah tertentu. Yang terakhir memiliki kaitan yang sangat erat dengan isu tentang bagaimana ilmuwan dapat menilai kemungkinan-kemungkinan bahwa bidang-bidang kajian yang mereka lakukan dibangun

di atas pertanyaan-pertanyaan yang sesat, dan bahwa penelitian-penelitian mereka dilakukan di atas pilihan penggunaan pendekatan-pendekatan keilmuan yang keliru dan oleh karena itu telah menghasilkan kesalahan-kesalahan pemahaman yang sangat mendasar; dan bagaimana keduanya sangat esensial bagi pengembangan kesyahihan metodologi masing-masing disiplin ilmu pengetahuan dan keseluruhan sistem intelektual yang mendasarinya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Stephen Jay Kline (1995) akan dapat terjadi atas perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi di masa yang akan datang.

Sebagai akibatnya, fungsi pertama lembaga pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan semakin banyak diambilalih oleh lembaga-lembaga penelitian non-pemerintah atau swasta yang memiliki dukungan dana yang kuat dan menuntut keahlian yang semakin terspesialisasi. Fungsi pengembangan ilmu pengetahuan yang selama ini secara internal dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi melalui kebijakan-kebijakan pengembangan infrastruktur dan iklim akademik, berkat dukungan perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi modern, kini harus dilakukan melalui persaingan yang semakin

keras dan tidak menguntungkan dengan lembaga-lembaga dan jaringan-jaringan pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin banyak berkembang di luar universitas dengan dukungan infrastruktur yang jauh lebih baik dan dana yang lebih besar.

Dampak lebih jauh dari semua perkembangan itu adalah bahwa peran lembaga pendidikan tinggi untuk mengintegrasikan aktivitas dan perkembangan unit-unit pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya menjadi semakin problematik. Program-program dan pusat-pusat studi yang selama ini menjadi ujung tombak universitas di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini semakin sulit dikendalikan untuk berkembang menjadi "kerajaan-kerajaan" kecil yang memiliki hubungan yang minimal satu dengan yang lain. Di hadapan tawaran dukungan sumber dana yang besar dan fasilitas-fasilitas yang lebih canggih dari kekuatan-kekuatan eksternal, tidak jarang bahkan dari lembaga-lembaga dana yang memiliki kaitan dengan kepentingan korporasi-korporasi transnasional, maka program-program dan pusat-pusat studi yang dimiliki universitas akan berkembang mengikuti irama dan dinamika mereka sendiri-sendiri. Sebagai akibatnya, berbagai di-

siplin ilmu pengetahuan menjadi semakin tidak dapat berbicara satu sama lain. Disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam, misalnya, yang pada abad limabelas dan enam belas memiliki kebesaran dan superioritas yang sangat tinggi oleh karena para ahlinya pada umumnya memiliki kapasitas sebagai ahli-ahli filsafat yang tidak hanya memiliki penguasaan atas fakta-fakta empiris akan tetapi juga konsep-konsep kemanusiaan yang kuat (Heidegger, 1977), kini semakin tidak dapat berbicara dengan para ahli ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Banyak diantara mereka menganggap para ahli ilmu-ilmu sosial dan humaniora lebih banyak membangun argumen keilmuan mereka di atas opini dan akal sehat yang tidak memiliki dukungan fakta-fakta empiris yang kuat dan terpercaya. Sebaliknya, disiplin ilmu-ilmu sosial yang pada awal kelahirannya berkembang dengan meminjam epistemologi positivisme dari disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam (Etz-kowitz, 1991), kini semakin bersikap skeptis terhadap kesyahihan fakta-fakta empiris yang "keras" yang dihasilkan melalui penggunaan metode-metode penelitian positivistik-naturalistik, dan oleh karena itu juga menjadi semakin tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan sejawat-sejawat mereka

dari disiplin ilmu-ilmu pengetahuan alam. Mereka menganggap banyak ahli ilmu-ilmu pengetahuan alam memberikan kepercayaan terlalu tinggi pada fakta-fakta empiris yang "keras", dan sebaliknya kurang menaruh perhatian pada pentingnya refleksi dan kontemplasi. Semua itu telah menyebabkan fungsi "liberasi" lembaga pendidikan tinggi untuk membantu masyarakat melepaskan diri dari berbagai bentuk penindasan, ketidakadilan dan dehumanisasi perlahan-lahan semakin mengalami kemerosotan dan oleh karenanya menjadi semakin problematik.

Jikalau kita dapat menerima pernyataan Denis Goulet (1971) bahwa pembangunan pertamanya bukan tentang pilihan ekonomi, pilihan politik, atau pilihan teknologi, melainkan tentang pilihan etis, maka implikasi reposisi peran lembaga pendidikan tinggi yang dimaksud pertama kali harus ditetapkan berdasarkan pilihan etis pula. Isu etis peran pendidikan tinggi perlu diperhatikan mengingat di dalam konteks globalisasi yang sedang terjadi saat ini hubungan antara teori dan praxis, akan menghadapi tantangan besar mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Hukum-hukum reproduksi diri masyarakat Indonesia di dalam era globalisasi di masa depan,

yang akan sangat menggantungkan kelestariannya pada skala eskalasi perluasan pengendalian teknis atas alam dan peningkatan administrasi manusia dan hubungan-hubungan mereka satu sama lain melalui organisasi sosial, akan menghadirkan ancaman menjadikan hubungan antara teori dan praxis tidak lebih daripada sebagai aplikasi rasional teknik-teknik yang didukung oleh ilmu pengetahuan empiris. Di dalam konteks yang demikian, potensi lembaga pendidikan tinggi bagi "pembebasan" dan "pencerahan" akan mengalami kemunduran menjadi tidak lebih daripada sebagai teknik-teknik pengendalian (*technical control*). Emansipasi umat manusia melalui pencerahan akan digantikan oleh pengendalian atas proses-proses yang obyektif atau diobyektifikasikan. Teori-teori yang secara sosial efektif tidak lagi terutama diarahkan pada kesadaran manusia yang hidup bersama dan mendiskusikan berbagai masalah satu sama lain, melainkan akan lebih diarahkan pada perilaku manusia yang bersifat manipulatif (Habermas, 1978; baca juga Nasikun 1993).

Memilih, dengan demikian, merupakan istilah paling tepat untuk membicarakan peran pendidikan tinggi di Indonesia di masa depan. Tanpa pilihan etis

yang benar, pendidikan ringgi hanya akan merupakan, meminjam istilah Paulo Freire (1970), proses penyimpanan deposit pengetahuan: di mana ruang lingkup tindakan yang terbuka bagi mahasiswa sebagai subyek didik hanyalah menerima, mengisi, dan menyimpan deposit. Di dalam konsep pendidikan yang demikian, pengetahuan merupakan pemberian (*gift*) yang disampaikan oleh guru yang dianggap serba mengetahui dihadapan anak atau subyek didik yang dianggap tidak mengetahui apa-apa. Di dalam konsep pendidikan yang demikian, lembaga pendidikan akan cenderung mengaburkan pengertian pengajaran (*teaching*) dari pengertian pembelajaran (*learning*), prestasi belajar dari pendidikan, ijazah dari kompetensi, kefasihan (*fluency*) dari kemampuan untuk mengemukakan sesuatu yang baru: pendek kata, mengaburkan proses dari substansi pendidikan, yang melahirkan logika bahwa semakin banyak *treatment* atau perlakuan akan semakin tinggi pula mutu suatu pendidikan. Memproyeksikan suatu kepedulian, yang menurut Freire merupakan suatu ideologi opresi, dosen "menegasi" pendidikan dan pengetahuan sebagai *processes of inquiry*: di mana hubungan antara guru dan murid semata-mata bersifat naratif dan ope-

rasif; dan yang isinya, baik berupa nilai atau dimensi empiris dari realitas, cenderung di dalam proses dinarasikan menjadi tidak hidup dan oleh karenanya tidak mendorong perkembangan kreativitas.

Sistem pendidikan tinggi yang demikian memiliki akibat langsung melestarikan, jikalau bukan mengukuhkan kontradiksi antara individu dan masyarakat pada berbagai tataran. Pada tataran pertama, sistem pendidikan yang demikian akan membuat manusia modern-industrial semakin tidak berdaya di hadapan masyarakat dan menimbulkan petaka menurunkan derajat manusia ke tingkat tidak lebih dari fungsionaris rasionalitas yang bersifat kompulsif, dingin, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkan emosi-emosi dan sensibilitas-sensibilitas kemanusiaan mereka. Dari sana mengalir akibat-akibat berantai yang lain, untuk menyebut degradasi lingkungan dan maraknya konflik sosial dan politik diantara yang paling penting. Pada tingkat yang lain, sistem pendidikan tinggi seperti itu cenderung hanya akan memiliki kepekaan untuk mengartikulasikan, ke dalam bentuk perkembangan IPTEK, kepentingan-kepentingan kelas yang berkuasa dan sebaliknya tidak memiliki kepekaan untuk menanggapi ke-

pentingan-kepentingan lapisan penduduk yang paling tidak berdaya.

Jikalau proses pendidikan tinggi di Indonesia di masa depan sebaliknya diharapkan dapat berperan mengendalikan proses pembangunan yang menjamin realisasi potensi kemanusiaan rakyatnya, ia harus di orientasikan pada proses dialog yang kreatif dan demokratik antara anak atau subyek didik dan pendidik. Di dalam proses pendidikan tinggi yang demikian, maka tujuan pendidikan bukan lagi terutama dan pertama-tama dimaksudkan untuk mengintegrasikan anak atau subyek didik ke dalam logika sistem yang ada dan mengembangkan keserasian terhadapnya, melainkan terutama dan pertama-tama untuk menciptakan sarana-sarana yang akan mendorong anak atau subyek didik memiliki kemampuan untuk secara kritis dan kreatif menghadapi realitas dan menemukan cara-cara untuk berpartisipasi di dalam transformasi dunia tempat mereka menjadi bagiannya (Richard Shaul, seperti dikutip Feire, *op.cit.*, 1970).

Bertalian dengan implikasi pedagogi yang dituntut oleh sistem pendidikan tinggi kita di masa depan sebagaimana diuraikan di atas, maka sistem pendidikan tinggi yang kita perlukan menuntut kelengkapan kuriku-

lum yang memiliki kemampuan membentuk kualitas anak atau subyek didik dan pendidik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang demikian. Kurikulum yang dimaksud, sebagaimana yang dilukiskan oleh Wren-Lewis (1974) antara lain harus memiliki sejumlah ciri atau properti berikut: (1) despesialisasi (*de-specialization*) dan (2) mendorong kemampuan berpikir ke depan yang sistematis (*systematic future thinking*). Yang pertama pada hakekatnya merupakan prasyarat bagi yang kedua. Sementara itu, *systematic future thinking* diperlukan untuk menjamin agar anak atau subyek didik dan pendidik memiliki kesadaran dan antisipasi terhadap akibat-akibat dari tindakan manusia di dalam partisipasi aktif mereka melakukan transformasi lingkungan hidup tempat mereka menjadi bagiannya. Pemikiran seperti itu tidak dapat dikembangkan hanya melalui penyelenggaraan matakuliah-matakuliah *socio-economic forecasting* dan ekologi. Keduanya tidak banyak maknanya, kecuali jikalau pengembangannya dilakukan berdasarkan kesadaran akan dua hal berikut: (1) harapan-harapan, ketakutan-ketakutan, dan nilai-nilai yang akan dapat memotivasi orang, sebagaimana tercermin di dalam perubahan pola-pola sejarah, politik, hukum, filsafat,

dan agama; dan (2) prinsip-prinsip, metode-metode, dan arah pertumbuhan ilmu pengetahuan kealaman dari mana peluang-peluang dan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh pengembangan dan penerapan teknologi di masa datang akan bersumber (Wren-Lewis, 1974; baca pula Nasikun, *op.cit.*, 1993).

Di luar penguatan struktur dan isi kurikulum, pengembangan sejumlah program atau pusat studi baru yang secara khusus dirancang untuk mengemban tiga fungsi berikut perlu dikembangkan pula untuk memperkuat beberapa program dan pusat-pusat studi interdisipliner yang sudah atau harus dikembangkan. Meminjam ungkapan Daly dan Cobb, Jr. (1998), fungsi pertama yang harus menjadi pusat perhatian program atau pusat studi tersebut menyangkut kajian-kajian kritis tentang eksistensi universitas sebagai suatu institusi "*culture-conserving*", "*culture-creating*"; dan "*civilizing-institution*"; tentang sejarah kelahirannya dan cara ia mengorganisasi berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dikembangkannya; tentang bagaimana ia membangun hubungannya dengan masyarakat tempat ia menjadi bagiannya; tentang sumbangan yang telah dan akan diberikan bagi perkembangan kemanusiaan; tentang kendala-

kendala yang menghalangi kebebasan universitas untuk mengungkapkan fungsinya; dan di atas semua itu, tentang kesyahihan asumsi-asumsi yang mendasari perkembangan berbagai disiplin keilmuan yang dikembangkannya serta bagaimana asumsi-asumsi yang mereka anut berkaitan satu dengan yang lain dan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Fungsi kedua, yang juga sangat penting bagi reposisi lembaga pendidikan tinggi di masa depan, berkaitan sangat erat dengan kajian-kajian sistematis tentang isu-isu kosmologi. Fokus perhatian yang harus menjadi obyek kajian mereka adalah mengungkapkan pemahaman yang utuh dan bulat tentang kosmologi dunia yang dibangun dari beragam informasi yang diperoleh dari perkembangan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus dijawab harus muncul dari upaya-upaya untuk mengkaitkan apa yang diperoleh dari kajian-kajian kemanusiaan dengan apa yang diperoleh dari kajian-kajian ilmu psikologi, kajian-kajian ilmu sosial, dan kajian-kajian ilmu-ilmu alam. Fungsinya yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya pula, bertalian sangat erat dengan kajian-kajian yang secara

khusus dan sistematis dirancang untuk melakukan analisa tentang beragam bentuk krisis yang terjadi pada tingkat nasional dan global: mulai dari analisa kritis tentang krisis moralitas dan kemanusiaan, krisis sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, sampai dengan krisis lingkungan.

Kebijakan kelembagaan perguruan tinggi yang ketiga menyangkut sistem administrasi penyelenggaraan kegiatan perkuliahan yang terintegrasi pada tingkat universitas untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk merencanakan dan mengembangkan kemampuan akademik dan profesional lintas disiplin yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan perubahan-perubahan global yang semakin berat di masa depan. Kebijakan yang dimaksud, yang di beberapa perguruan tinggi dalam waktu yang tidak lama lagi sudah akan segera dilaksanakan, jelas menuntut sistem manajemen baru dengan dukungan infrastruktur baru yang masih harus terus dikembangkan.

Bagaimana semua itu menemukan peran berbagai disiplin ilmu pengetahuan di dalam sistem pendidikan tinggi kita di masa depan, merupakan sebuah tantangan yang harus segera ditemukan jawabnya. Idealnya, ilmu-ilmu pengetahuan sosial

dan humaniora, termasuk ilmu ekonomi, hukum dan filsafat, dapat berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan pemikiran mereka yang pekerjaan dan perhatiannya sangat bersifat teknis dengan mereka yang minatnya ditujukan pada masalah-masalah kemanusiaan. Sebaliknya, ilmu-ilmu pengetahuan kealaman dan teknik, termasuk biologi dan matematika, memiliki peran sangat kunci untuk menghasilkan lingkungan material kehidupan manusia yang di satu sisi memungkinkan pengungkapan kualitas kehidupan yang sesuai dengan pilihan nilai-nilai yang kita kehendaki dan pada sisi yang lain mencegah pengungkapan kualitas kehidupan yang tidak sesuai dengan pilihan nilai-nilai yang kita kehendaki. Di dalam hubungannya dengan pergulatan masa depan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di hadapan konteks mondial seperti yang sudah diuraikan di atas, semua itu berarti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih berwawasan *Hi-Touch* daripada *Hi-Tech* di dalam pengertiannya Myun W. Lee (1993), ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih berorientasi pada produk-produk berskala kecil dan berwajah manusiawi, dan lebih dari itu yang lebih mencerahkan dan lebih bersifat emansipatoris.

Daftar Pustaka

- Amin, Samir. 200. *Capitalism in The Age of Globalization: The Management of Contemporary Society*, Zed Books.
- Bello, Walden. 2002. *Deglobalization: Ideas For A New World Economy*, Zed Books; atau Martin Khor. 2001. *Rethinking Globalization: Critical Issues and Policy Choices*, Zed Books.
- Bessis, Sophie. 2003. *Western Supremacy: The Triumph of an Idea?*, London & New York: Zed Books.
- Brysk, Alison. 2002. *Globalization and Human Rights*, Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
- Daly, Herman E. and John B. Cobb, Jr. 1989. *For the Common Good: Redirecting the Economy Toward Community, the Environment, and a Sustainable Future*. Boston: Beacon Press.
- de Rivero. 2001. *The Myth of Development: Non-Viable Economics of the 21st Century*, London & New York: Zed Books.
- Etzkowitz, Henry and Ronald M. Glassman. 1991. *The Renaissance of Sociological Theory: Classical and Contemporary*, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc.
- Freire, Paulo. 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.
- Furnivall, J.S., 1967. *Netherland India: A Study of Plural Economy*, Cambridge University Press.
- Gelinas, Jacques R. 2003. *Juggernaut Politics: Understanding Predatory Globalization*, Zed Books.
- Goulet, Denis. 1971. *The Cruel Choice: A New Vconcept in the Theory of Development*, New York: Atheneum.
- Habermas, Jurgen. 1976. "Theory and Practice in a Scientific Civilization", dalam Paul Connerto (Ed.), *Critical Sociology*, Penguin Books
- Heidegger, Martin. 1977. "Modern Science, Methaphysics, and Mathematics", dalam Krell, David F. *Martin Heidegger Basic Writings: From Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964)*, London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Hertz, Noreena. 2001. *The Silent Takeover: Globalization and the Death of Democracy*, The Free Press.
- Hutchinson, J. and A.D. Smith (Eds.). 1994. *Nationalism*, Oxford: Oxford University Press.
- Khor, Martin. 2002. *Rethinking Globalization: Critical Issues and Policy Choices*, London and New York: Zed Books.
- Kline, Stephen Jay. 1995. *Conceptual Foundations for Multidisciplinary Thinking*, Stanford, California: Stanford University Press.
- Kymlycka, Will. 1999. *Contemporary Political Philosophy: An Introduction*, Oxford: Clarendon Press.

- Lachmann, Werner et al. 1995. *Social Security in Social Market Economy*, Konrad-Adenauer Stiftung.
- Lee, Myun W. 1993. "The Theory W: A New Philosophy for the Pasific Rim", *Pasific Rim Forum '93*. Bali, 1993.
- Madeley, John. 1999. *Big Business Poor People: The Impact of Transnational Corporations on the World's Poor*, Zed Books.
- _____. 2000. *Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade*, London and New York: Zed Books.
- _____. 2002. *Food for All: The Need for A New Agriculture*, London and New York: Zed Books;
- Nasikun. 1993. "Industrialisasi, Pengembangan IPTEK, dan Orientasi Pendidikan Tinggi di Masa Depan", Pidato Dies Natalis ke 28 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- _____. 2005. "Peran Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi", Kuliah Perdana Sekolah Pasca-sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Noam, Eli M. 1995. "Electronics and the Dim Future of the University", dalam *Science*, Vol. 270, pp 247-249.
- Peet, Richard. 2003. *Unholy Trinity: IMF, World Bank, and WTO*, SIRD, London and New York: Zed Books.
- Quintela, Sandra. 2003. "A Solidarity Economy", dalam William F. Fisher and Thomas Ponniah, *Another World is Possible: Popular to Globalization at the World Social Forum*, London and New York: Zed Books.
- Rabushka, Alvin and Kenneth A. Shepsle. 1972. *Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Stability*, Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Robertson, Robbie. 2001. *The Three Waves of Globalization: A History of a Developing Global Consciousness*, Zed Books.
- Tehrani, Majid. 1999. *Global Communication and World Politics: Domination, Development, and Discourse*, Linne Rienner Publishers.
- Rostow, Eugene V. 1970. "The Rightful Limits of Freedom in a Liberal Democratic State: of Civil Disobedience", dalam Eugene V. Rostow, *Is Law Dead?*, New York: Simon and Schuster.